



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pencapaian Target/ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Balangan perlu disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor



3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMNET GOALS* TAHUN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Balangan.
7. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustanaible Depelopment Goals* yang selanjutnya disingkat Matriks RAD TPB/SDGs adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* yang berisikan Target TPB/ SDGs, Indikator



TPB/ SDGs, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Balangan.

BAB II MATRIKS RAD TPB/SDGs

Pasal 2

Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Pasal 3

Matriks RAD TPB/SDGs adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Matriks RAD TPB/ SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam upaya pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*.

BAB III KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Tim Koordinasi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Balangan melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 dilaksanakan



sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jika dalam perkembangan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 terdapat evaluasi pada Matriks ini, Tim Koordinasi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Balangan dapat melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 kepada Bupati Balangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang selanjutnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam Dokumen laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

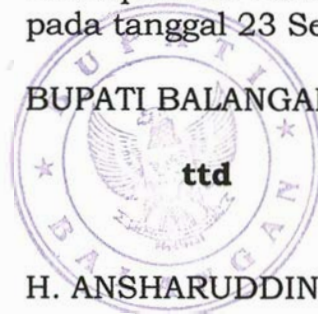
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI BALANGAN,

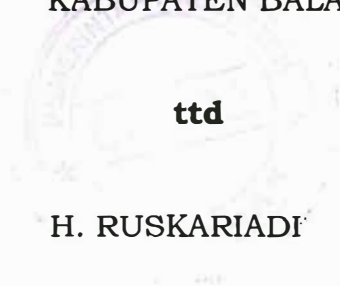


ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 43

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

[illegible]

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	PUPR	Unit	18	10	10	10	10	PUPR
				PUPR	Unit	1	1	1	1	1	PUPR
				PUPR	Unit	38	10	10	10	10	PUPR
	6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ <i>Stop Buang Air Besar Sembarangan</i> (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	6.3.2 (a)	Kualitas air danau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas LH	Indeks	46	47	0	0	0	LH
	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air disemua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Indikator global yang akan dikembangkan								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.1 (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan								
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Perkim	Unit	18	-	45	45	45	Perkim
	11.1.1 (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.1.1 (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Perkim	Lokasi	1	-	1	1	1	Perkim
				Perkim	Lokasi	0	-	-	3	3	Perkim
				Perkim	Lokasi	14	-	10	10	10	Perkim
				Perkim	Lokasi	0	-	-	3	3	Perkim

Handwritten signature and official stamp at the bottom right corner.

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terdistribusi menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	11.2.1 (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Jateng : Dishub)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	PUPR	km	30.646	2,555	14	20	25	PUPR
	11.2.1 (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanaman permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	11.3.1 (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.3.1 (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	11.3.2 (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.3.2 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
11.4 Mempromosikan dan menjaga budaya dunia dan warisan alam dunia	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.5.1 (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.5.1 (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	PUPR	dok	2	2	2	2	2	PUPR
				PUPR	ha	108,32	1,5	0,5	0,5	0,5	PUPR
	11.7.1 (a)	Persentase meningkatnya tutupan lahan untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah	11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan merencanakan yang terintegrasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.								
TUJUAN 12 (KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB): MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes of Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien	12.2.1 Jejak material (material footprint). 12.2.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).	Indikator global yang akan dikembangkan Indikator global yang akan dikembangkan								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Indikator global yang akan dikembangkan								
	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi-informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	LH	Kegiatan	2	2	2	2	2	LH
				LH	izin	4	22	24	25	27	LH
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
12.6 Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat dimana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
12.9 Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan								
	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Indikator global yang akan dikembangkan								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.	Indikator global yang akan dikembangkan								
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)											
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)								
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi adaptasi pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi	Indikator global yang akan dikembangkan.								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dollar Amerika per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia								
13.b Menggalakan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara urang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda serta masyarakat lokal dan marjinal	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia								
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN (MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)											
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung	Indikator global yang akan dikembangkan.								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	14.2.1 (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
14.6 Pada tahun 2020 melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the Worl Trade Organization	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	14.6.1 (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.								
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang alih teknologi kelautan untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small scale artisanal fishe r</i>) terhadap sumebr daya laut dan pasar	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the sea, yang menyediakan kerang hukum untuk pelestairan dan pemanfaatan berkelanjutan lautn dan sumber dayanya, seprti yang tercantum dalam ayah 158 dari : the future we want"	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI)											
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistemm daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indikator global yang akan dikembangkan.								
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2030 melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk kehidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi kehidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	15.7.1 (a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	15.7.1 (b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
15.8 Pada tahun 2030, memperkenalkan langkah-langkah untuk mnecegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dan jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	15.8.1 (a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

REVISI
1
01/03/2021

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan)											
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpolah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Satpol PP	kasus	135	140	110	70	30	Satpol PP
				Kesbang Politik	kasus	-	10	9	9	8	Kesbang Politik
	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
16.2 Menghentikan perilaku kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak	16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
15.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Inspektorat			4	2	2	3	Inspektorat
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	BKD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Setda		-	100% (9,00)	100% (9,20)	100% (9,40)	100% (9,60)	Setda
				Inspektorat			-	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	Inspektorat
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan	Persentase	-	91,70%	91,75%	91,80%	91,85%	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)								
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global	16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Kesbang Politik	Persentase	-	-	90%	95%	-	Kesbang Politik
	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Dukcapil	Buah	186,026	3,500	5,000	4,500	4,000	Dukcapil
16.9 Pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

7

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
TUJUAN I: TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indikator global yang akan dikembangkan	Din. Sosial	orang		40	40	40	40	Dinas Sosial
	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Din. Sosial	Jiwa		29,714	29,714	29,714	29,714	Din. Sosial
	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Din. Sosial	orang		400	400	400	400	Din. Sosial

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Din. Sosial	KK		4000	4000	4000	4000	Din. Sosial
	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Din. Sosial	Rumah		32	40	40	40	Din. Sosial
	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan		87.79	87.96	88.16	88.41	88.76	Dinas Pendidikan

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan		63.07	63.24	63.42	63.58	63.61	Dinas Pendidikan
	1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya bukan listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Pada tahun 2030, pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Bid. Kedaruratan & Logistik		1250 orang	1150 orang	1000 orang	800 orang	650 orang	BPBD
	1.5.1 (a)	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan risiko Bencana Daerah	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Bid. Rehabilitasi & Rekonstruksi		8 Desa	4 Desa	4 Desa	6 Desa	8 Desa	BPBD
	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

[illegible]

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	inas Kesehatan	%	0	92	95	98	100	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	Indikator global yang akan dikembangkan								

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara sukarela bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanah the Doha Development Round	2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA)											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).			214	214	180	180	180	Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhinya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

REVISI
No. 1
Tgl. 01/08/2021

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).			13	12.8	12.5	12.3	12	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%	80.1	83	84	85	86	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	%	100	100	100	100	100	dinkes
	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	%	100	100	100	100	100	dinkes
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	-	0	2	1	1	1	dinkes
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	%	-	85	86	87	89	dinkes
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)..	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4.2	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4.3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4.4	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4.5	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		%	75.07	75.31	75.55	75.99	76.03	DPPKB
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal. Termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).								
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).			100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.a Memperkuat pelaksanaan the framework convention on tobacco control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk mengemukakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan dan aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	%	90	90	92	92	92	dinkes
	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	orang	29	34	39	44	50	dinkes
				dinkes	orang	15	26	27	27	27	dinkes
				dinkes	orang	16	29	37	45	50	dinkes



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	tahun	6.32	7	7.5	8	10	Dinas Pendidikan
	4.2.1	Proporsi anak usia dibawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran dan psikososial menurut jenis kelamin	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)..	-	tahun	57.2	60.38	65.87	67.96	67.96	Dinas Pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; dan (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Indikator global yang akan dikembangkan.	Dinas Pendidikan	-	81	81	86	87	90	-
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)..	-	-	-	-	-	-	-	-
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan, guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan	%	42.46	43	44	45	45.5	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan	%	70.92	71.02	71.14	71.29	71.47	Dinas Pendidikan
				Dinas Pendidikan	%	93.45	93.6	93.76	93.94	94.14	Dinas Pendidikan
				DPPPA	okumen/Dokumen	0	0	1	1	1	DPPPA
				-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).			1.5	2.75	2.7	2.68	2.65	DPPPA
						1	1.58	1.66	1.54	1.5	DPPPA



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA	-	0	0	100	100	100	DPPPA
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA	%	0	0	30	30	30	DPPPA
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revisi dari konferensi konferensi tersebut	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaann perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-



MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Target	Kode indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA)											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS/Susenas		53.84	59.99				
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi terbarukan, efisiensi energi, canggh, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar	Indikator global yang akan dikembangkan.								
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negaran berkembang.	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan	Indikator global yang akan dikembangkan.								
TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinas perdagangan	%		5,75	6,00	6,18	6,37	Dinas Perdagangan
				Pemkab Balangan	%		6,36	6,41	6,46	6,51	Pemkab Balangan

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	8.1.1 (a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pembalangan	Juta (Rp)		74.674.446,85	78.408.169,20	82.328.577,66	86.445.006,54	Pemkab Balangan
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB rili per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Pembalangan	Juta (Rp)		22.393.900,72	23.513.595,75	24.689.275,54	25.923.739,32	Pemkab Balangan
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Disnamdal & PTSP	%		5,00	5,00	5,00	5,00	Disnamdal & PTSP
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional	Persen	22.50	23.88				BPS
	8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional	Persen		98.95				
	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Diskoperin	%		5,00	5,00	5,00	5,00	Diskoperin
8.4 meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produk, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-year framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah	8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>)	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
8.5 pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Disnakertrans	%		3,03	2,95	2,85	2,75	Disnakertrans
	8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional			8.93				BPS
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional			17.2				BPS

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk buruk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
8.9 Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)								
	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
			Indikator daerah sebagai proksi indikator nasional								
	8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan mempromosikan akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	8.10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	Indikator global yang akan dikembangkan.								
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced for Trade-Related technical Assistance bagi negara kurang berkembang	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB	Indikator global yang akan dikembangkan.								
TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI)											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume angkutan, menurut jenis transportasi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Dishub	%		50,99%	68,55%	83,36%	100,00%	Dishub
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	BPS		1.99	1.92				BPS
	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS		5.37	2.90				BPS
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkutuk daratan dan negara-negara pulau kecil	9.4.1 (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	Indikator global yang akan dikembangkan.								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	9.c.1 *	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)	Persen	58.71	60.40				BPS
	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)	Persen	24.52	28.89				BPS
TUJUAN 10: BERKURANGNYA Kesenjangan (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 % dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 *	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)		0.411	0.310				BPS
	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)		5.68	5.59				BPS
	10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pendataan Potensi Desa			8,44				BPS
	10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pendataan Potensi Desa							BPS
	10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA			65,56	65,59	65,62	65,65	DPPPA
10.4 Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya	10.5.1	Financial Soundness Indicator	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.7.2 (b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan ebrbeda bagi negara berkembang, khususnya egara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.								
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
TUJUAN 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)											
17.1 Memperkuat mobilitasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Bakeuda	%		0,05	0,05	0,06	0,06	Bakeuda
				Bakeuda	%		0,07	0,07	0,08	0,08	Bakeuda
	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance -ODA) termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GN) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang, penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	17.3.2 (a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditunjukkan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang, dan restrukturisasi utang, yang sesuai dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan Investasi bagi negara kurang berkembang	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan								
17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	17.6.1 (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan								
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Indikator global yang akan dikembangkan								
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan								
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan								
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyalpan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
	17.19.1 (b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BKPPD	%		48%	57%	65%	74%	BKPPD
	17.19.1 (c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/ Lembaga	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan								
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS			3865	3800			
	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS			96,05	96			
	17.19.2 (e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS			72,23				



MATRIK BAGIAN II: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021			
Program 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)									
TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)									
INDIKATOR SDGs : 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi									
INDIKATOR PROGRAM : Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku									
Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Panjang pipa suplay air baku	km	1,437	1	1	1	9,620,000,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi									
INDIKATOR PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih									
Kegiatan 1. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	Jumlah sambungan rumah (SR)	SR	1000	200	250	280	10,394,000,000	DAK Kab. Balangan	PUPR
Kegiatan 2. Pengembangan jaringan perpipaan distribusi air minum	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun	m	252782	10000	13000	15000	30,331,450,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
Kegiatan 3. Pengembangan jaringan air minum sambungan rumah	Jumlah sambungan rumah (SR)	SR	0	360	400	420	8,244,100,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase prasarana MCK yang berfungsi									
INDIKATOR PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih									
Kegiatan 1. Penyediaan prasarana sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Unit	18	10	10	10	10,869,270,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
Kegiatan 2. Penyediaan sarana sanitasi	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Unit	1	1	1	1	2,552,550,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
Kegiatan 3. Penyediaan prasarana sanitasi (DAK)	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Unit	38	10	10	10	8,910,720,000	DAK Kab. Balangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.									
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air									
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Kegiatan hanya ada tahun 2017-2018 sedang 2019 dan seterusnya dihapus)	Indeks	46	0	0	0	175,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
INDIKATOR SDGs : 6.6.1 (e) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.									
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air									
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (hanya dilaksanakan pada tahun 2018)									
Program Kali Bersih (PROKASIH)	Jumlah sungai kali bersih (pokasih)	Sungai	1	2	2	2	400,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
TUJUAN 11: KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)									
INDIKATOR SDGs : 11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase rumah layak huni									
INDIKATOR PROGRAM : Program Pengembangan Perumahan									
Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	18	45	45	45	3,378,715,600	APBD Kab. Balangan	Perkim

72

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR SDGs : 11.1.1 (c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.										
INDIKATOR PROGRAM : Persentase kawasan kumuh yang tertangani										
PROGRAM : Program penanganan kawasan permukiman										
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah lokasi yang dibangun	Lokasi	1	-	1	1	1	3,044,419,006	APBD Kab. Balangan	Perkim
PROGRAM : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan										
Kegiatan 1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	Jumlah lokasi kawasan perumahan yang terpelihara	Lokasi	0	-	-	3	3	2,100,000,000	APBD Kab. Balangan	Perkim
Kegiatan 2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Jumlah lokasi ditingkatkannya drainase	Lokasi	14	-	10	10	10	3,986,579,226	APBD Kab. Balangan	Perkim
Kegiatan 3. Pemeliharaan Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Jumlah lokasi dipeliharanya drainase	Lokasi	0	-	-	3	3	2,100,000,000	APBD Kab. Balangan	Perkim
INDIKATOR SDGs : 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Jateng : Dishub)										
INDIKATOR PROGRAM : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap										
PROGRAM : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										
Kegiatan Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	30.646	2,555	14	20	25	172,976,522,500	APBD Kab. Balangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penanganan sampah										
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan, Limbah dan Peningkatan Kapasitas										
Kegiatan 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R	%	8	11	14	18	22	1,220,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
Kegiatan 2. Pemeliharaan alat angkut sampah	Jumlah angkutan sampah yang terpelihara	buah	0	0	29	30	31	1,900,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
Kegiatan 3. Mengumpulkan dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Jumlah sampah yang terangkut	ton	0	0	23	25	27	8,300,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
Kegiatan 4. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah	paket	6	6	6	6	6	4,000,000,000	APBD Kab. Balangan	LH
INDIKATOR SDGs : 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										
INDIKATOR PROGRAM : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang										
PROGRAM : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
Kegiatan 1. Perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	2	2	2	2	2	1,418,500,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
Kegiatan 2. Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH kawasan perkotaan terbangun	ha	4	1,5	0,5	0,5	0,5	5,371,100,000	APBD Kab. Balangan	PUPR
TUJUAN 12 : (KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB): MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
INDIKATOR SDGs : 12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air										
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pembinaan terhadap perusahaan tempat usaha penghasil limbah	Kegiatan	2	2	2	2	2	270,000,000	APBD Kab. Balangan	LH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penanganan sampah										
PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Kegiatan Administrasi perizinan limbah cair dan B3	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah	izin	4	22	24	25	27	300.000.000	APBD Kab. Balangan	LH



MATRIK BAGIAN II: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	2018	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
					2019	2020	2021			
TUJUAN I: TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)										
INDIKATOR SDGs : 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
INDIKATOR PROGRAM : Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi										
Kegiatan 1 : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Konsumsi		%	4.73	4.54	-	-	-	Tahun 2018 : 3,552,870,000	APBN	BPS Kalsel
INDIKATOR SDGs : 1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat										
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat										
PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Pembangunan gedung sekolah	Terpenuhinya pemenuhan SPM (rasio rombel)	ruang		6	6	6	6			
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sejumlah ruang kelas/pemenuhan SPM (rasio rombel)	paket		20	20	20	20			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya sejumlah buku dan alat tulis siswa	paket		9500	9500	9500	9500			
Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya sejumlah perlengkapan sekolah	paket		249	249	249	249			
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terehabnya sejumlah ruang kelas yang terehabilitasi / Pemenuhan SPM (Rasio Rombel)	ruang		40	40	40	40			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	terehabnya laboratorium dan ruang praktikum	paket		3	3	3	3			
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Meningkatkan kompetensi siswa	org		95	95	95	95			
Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersusnya Kurikulum yang sesuai peraturan	org		400	400	400	400			
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Terselenggaranya Operasional sekolah yang lebih baik	sekolah		200	200	200	200			
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya sejumlah buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	paket		195	195	195	195			
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	sekolah		40	40	40	40			
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya Porseni Kabupaten	org		800	800	800	800			
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersampainya berbagai informasi Pendidikan dasar	org		1500	1500	1500	1500			
Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	orang		525	525	525	525			
INDIKATOR SDGs : 1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat										
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat										
PROGRAM : Program Pendidikan Menengah										
Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya sejumlah gedung sekolah	buah		3	3	3	3			
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sejumlah ruang kelas	buah		1	1	1	1			
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	Tersedianya sejumlah laboratorium	buah		2	2	2	2			
Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	buah		2	2	2	2			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya Sejumlah Buku-buku dan Alat Tulis	paket		1	1	1	1			
Pengadaan perlengkapan sekolah	Terpenuhinya Sejumlah Perlengkapan Sekolah	Paket		3	3	3	3			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terpenuhinya Sejumlah Perlengkapan Sekolah	ruang		2	2	2	2			



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021		
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Terpenuhinya honor guru, TU, Pustakawan dan Penjaga Sekolah dll	org		360	360	360	360		
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem serta sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Teraksananya pembinaan Manajemen Sekolah	sekolah		24	24	24	24		
Penyebarnyaasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Tersosialisasinya Informasi tentang kebijakan-kebijakan baru pendidikan	kegiatan		5	5	5	5		
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Teraksananya lomba OSN, O2SN, FLS2N dan Lomba UKS	siswa		700	700	700	700		
TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN (MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN)									
INDIKATOR SDGs : 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase Balita kurus (Wasting)									
PROGRAM : Perbaikan gizi masyarakat									
Kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya		Persentase		80	85	90	95	APBD Dinkes	Dinkes
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		Desa		1	2	2	3	APBD Dinkes	Dinkes
Peningkatan gizi masyarakat		Persentase		78	80	82	85	APBD Dinkes	Dinkes
PROGRAM : Perbaikan pelayanan kesehatan penduduk miskin									
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar		Persentase		100	-	-	-	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase ibu hamil mendapat tablet tambah darah									
PROGRAM : Perbaikan gizi masyarakat									
Kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya		Persentase		92	95	98	100	APBD Dinkes	Dinkes
TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA) BERKELANJUTAN)									
INDIKATOR SDGs : 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan keluarga oleh tenaga kesehatan									
PROGRAM : Program Kesehatan Keluarga									
Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin		%		-	100	100	100	APBD Dinkes	Dinkes
Kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin (DAK)		Buah			4	4	4	APBN (DAK)	Dinkes
INDIKATOR PROGRAM : Jumlah kematian ibu									
PROGRAM : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak									
Kegiatan Audit Maternal Perinatal		Kali		18	-	-	-	APBD Dinkes	Dinkes
Kegiatan pertolongan persalinan bagi ibu hamil (DAK)		Buah		4	-	-	-	APBD Dinkes	Dinkes
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan ibu dan anak		Persentase		100	-	-	-	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan keluarga oleh tenaga kesehatan									
PROGRAM : Program Kesehatan Keluarga									
Kegiatan Pelayanan kesehatan anak balita		%		-	100	100	100	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan bayi									
PROGRAM : Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)				Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021			
Kegiatan penyuluhan kesehatan anak Balita	Kelas		18	-	-	-	190,172,600	APBD Dinkes	Dinkes
Pelatihan dan pendidikan perawat anak	Orang		15	-	-	-	321,788,800	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									
INDIKATOR PROGRAM : persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap									
PROGRAM : Program Surveillans dan Imunisasi									
Kegiatan 1 : Peningkatan Imunisasi	%	80.1	83	84	85	86	3,347,237,500	APBN	BPS Kalsel
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Kegiatan imunisasi	Jumlah bayi, Baduta, anak SD/ sederajat, WUUS, bumil dan anak usia 9 bulan sampai dengan kurang 15 tahun yang mendapat pelayanan imunisasi		36,956	-	-	-	905,554,700	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100	100	100	100	2,364,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		100	100	100	100	2,364,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Prevalensi penderita malaria 1/1.000 penduduk		2	1	1	1	3,202,392,147	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)	Angka cakupan pengobatan massal filariasis		85	86	87	89	3,202,392,147	APBD Dinkes	Dinkes
Pengendalian penyakit menular langsung (P2PML)	CDR kusta/100.000 penduduk		2	2	2	2	2,364,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									
INDIKATOR PROGRAM : Cakupan pembiayaan jaminan kesehatan									
PROGRAM : Penguatan jaminan kesehatan dan dukungan finansial untuk penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat									
Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah		100	100	100	100	115,500,000,000	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BMI-HP dan vaksin 80%									
PROGRAM : Obat dan perbekalan kesehatan									
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas		12	12	12	12	13,973,093,500	APBD Dinkes	Dinkes
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pendistribusian obat dan perbekes		120	120	120	120	415,173,600	APBD Dinkes	Dinkes

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021		
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Persentase puskesmas dan sarana kefarmasian melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	APBD Dinkes	Dinkes
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase pengelolaan obat di instalasi gudang farmasi	Persentase		100	100	100	100	APBD Dinkes	Dinkes
TUJUAN 4: PENINGKATAN BERKUALITAS (MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA)									
INDIKATOR SDGs : 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MTs/ sederajat.									
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MTs/ sederajat.									
PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
Pembangunan gedung sekolah	Terpenuhinya pemenuhan SPM (rasio rombel)	ruang		6	6	6	6		
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sejumlah ruang kelas/pemenuhan SPM (rasio rombel)	paket		20	20	20	20		
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya sejumlah buku dan alat tulis siswa	paket		9500	9500	9500	9500		
Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	paket		249	249	249	249		
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terehabnya sejumlah ruang kelas yang terehabilitasi / Pemenuhan SPM (Rasio Rombel)	ruang		40	40	40	40		
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	terehabnya laboratorium dan ruang praktikum	paket		3	3	3	3		
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Meningkatkan kompetensi siswa	org		95	95	95	95		
Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersusnya Kurikulum yang sesuai peraturan	org		400	400	400	400		
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Terselenggaranya Operasional sekolah yang lebih baik	sekolah		200	200	200	200		
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya sejumlah buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	paket		195	195	195	195		
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	sekolah		40	40	40	40		
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya Porseni Kabupaten	org		800	800	800	800		
Penyebarluasan dan sosialisasi sebagai informasi pendidikan dasar	Tersampaikannya berbagai informasi Pendidikan dasar	org		1500	1500	1500	1500		
Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	orang		525	525	525	525		
INDIKATOR SDGs : 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat									
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat									
PROGRAM : Program Pendidikan Menengah									
Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya sejumlah gedung sekolah	buah		3	3	3	3		
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sejumlah ruang kelas	buah		1	1	1	1		
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	Tersedianya sejumlah laboratorium	buah		2	2	2	2		
Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	buah		2	2	2	2		
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya Sejumlah Buku-buku dan Alat Tulis	paket		1	1	1	1		
Pengadaan perlengkapan sekolah	Terpenuhinya Sejumlah Perlengkapan Sekolah	Paket		3	3	3	3		
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terehabnya Sejumlah Laboratorium	ruang		2	2	2	2		
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Terpenuhinya honor guru, TU, Pustakawan dan Penjaga Sekolah dll	org		360	360	360	360		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021		
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem serta sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)		sekolah		24	24	24	24		
	Terlaksananya pembinaan Manajemen Sekolah								
	Penyebarnya informasi tentang kebijakan-kegiatan baru pendidikan	kegiatan		5	5	5	5		
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	siswa		700	700	700	700		
Terlaksananya lomba OSN, OZSN, FLS2N dan Lomba UKS									
INDIKATOR SDGs : 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
PROGRAM : Program Pendidikan Anak Usia Dini									
Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	Sekolah	1	1	1	1	8		Dinas Pendidikan
Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas	Kelas	2	1	1	1	8		Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya sejumlah alat praktek dan peraga untuk siswa	Paket	2	6	8	8	8		Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah pendidik yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	Orang	0	635	635	635	635		Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terpenuhi semua biaya operasional PAUD Negeri pembina, TK Harapan Bangsa SKB	Lembaga PAUD	6	8	8	8	8		Dinas Pendidikan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	Jumlah pendidik yang mendapatkan pelatihan kurikulum dan pembelajaran	Orang	635	635	635	635	635		Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs : 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.									
INDIKATOR PROGRAM : 1. Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
2. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
3. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV									
PROGRAM : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru bersertifikat	guru		686	686	686	686		Dinas Pendidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidik	PTK		600	600	600	600		Dinas Pendidikan
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Peningkatan kualitas gugus dan kompetensi/krafitas guru	gugus		40	40	40	40		Dinas Pendidikan
Penilaian angka kredit jabatan fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	org		1,800	1,800	1,800	1,800		Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs : 4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin									
INDIKATOR PROGRAM : Peningkatan kualitas, keterampilan KF dan angka melek huruf									
PROGRAM : Program Pendidikan Non Formal									
Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah waraga KF yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	Warga Belajar	2050	2,710	0	70	60		
Pelaksanaan Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA	Jumlah penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C	Kegiatan	3	3	3	3	3		
TUJUAN 6: KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)									
INDIKATOR SDGs : 5.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan									
INDIKATOR PROGRAM : Jumlah dokumen/draft kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan									
PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan									
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah dokumen/draft kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	Dokumen/Draf	0	0	1	1	1		
INDIKATOR SDGs : 5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO									
PROGRAM : Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan									



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2018	2019	2020	2021		
Pelayanan Pendampingan (Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum dan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Persentase jumlah perempuan yang mengalami kekerasan yang didampingi	Persentase	0	0	100	100	100		
	Persentase pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase	0	0	100	100	100		
INDIKATOR SDGs : 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase keterlibatan perempuan di parlemen									
PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan									
Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum dan sosial	Orang	0	0	100	100	100		
	Jumlah peserta pelatihan yang memahami tentang pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Orang	0	0	50	50	50		



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
				2018	2019	2020				
PROGRAM: Pembinaan Perkebunan										
Kegiatan 1 : Polikultur KKKU	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	-	1	-	-	80,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Ring 1 dan Ring 2	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 2 : Pemeliharaan Kebun Koleksi	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	1	1	-	-	90,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Gampa	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 3 : Bantuan Saprodi Penanggulungan Jamur Akar Putih	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	-	1	-	-	75,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Baruh Bahinu Dalam, Pamurus, Murung Abuin, Balida, Maradap	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 4 : Peningkatan Mutu Bokar	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	1	1	-	-	117,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Kabupaten Balangan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 5 : Budidaya Lada	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	1	1	-	-	28,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Kabupaten Balangan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 6 : Bantuan Bibit Durian Unggul	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	-	1	-	-	25,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Halong	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 7 : Kebun Karet Unggulan Balangan	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	Paket	1	1	-	-	253,000,000	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Ring 1 dan Ring 2, Desa Tawahan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja



BUPATI BALANGAN,

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

1